

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Akuntansi Dan Akuntabilitas**

###### **a. Akuntansi**

Akuntansi, yang dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur untuk menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menilai kesehatan dan kinerja suatu bisnis, adalah sistem pelaporan. Tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan laporan kepada pemangku kepentingan yang dapat membantu mereka dalam membuat penilaian ekonomi yang lebih tepat. Mencari bimbingan secara konsisten dari sumber-sumber terkait untuk mencapai tujuan tertentu adalah metode paling efektif bagi organisasi untuk memantau kemajuan kegiatannya, suatu tujuan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh setiap manajer. Akuntan melacak uang yang masuk dan keluar dari bisnis dengan mencatat dan melaporkan peristiwa dan transaksi keuangan tertentu melalui pengukuran, klasifikasi, dan ringkasan. Perusahaan terus menggunakan laporan ini untuk pengambilan keputusan (Harahap, J, and Sanjaya 2021).

Untuk mengubah data dari transaksi menjadi laporan tentang uang, akuntansi adalah suatu sistem pelaporan. Fungsi utama akuntansi adalah mencatat dan memantau transaksi moneter. Proses akuntansi mencakup pengakuan, dokumentasi, interpretasi, dan komunikasi peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada konsumen informasi. Organisasi yang menghasilkan laporan keuangan menggunakan laporan ini sebagai keluaran dari prosedur akuntansinya. Dokumentasi tertulis diperlukan untuk semua proses ini, dan dokumentasi inilah yang menjadi landasan bagi semua transaksi.

Memahami akuntansi dari sudut pandang mereka yang menggunakan akuntan juga bermanfaat. "Suatu bidang yang anggotanya menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan untuk operasi organisasi yang efisien dan penilaian kegiatannya" kata salah satu sumber ketika diminta mendefinisikan akuntansi. Akuntansi dapat dijelaskan dengan cara ini.

Akuntansi, menurut definisi, adalah proses dimana suatu bisnis melacak, mengatur, merangkum, melaporkan, dan menganalisis data keuangannya. “Disiplin yang mencakup dokumentasi sistematis, kategorisasi, dan ringkasan moneter ringkas dari semua transaksi dan kejadian dengan komponen keuangan” adalah definisi American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tentang akuntansi. Selanjutnya, setelah itu kita akan menilai dan memahami hasilnya (Azhari 2021). Penting bagi keberhasilan bisnis apa pun bahwa akuntansi menyimpan catatan yang akurat atas semua uang tunai yang masuk dan keluar. Sederhananya, akuntansi adalah proses dimana transaksi keuangan suatu bisnis atau entitas lain diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan (Harahap, J, and Sanjaya 2021). Definisi ini menyatakan bahwa ada tiga fungsi utama dalam akuntansi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi bisnis perusahaan adalah tujuan utama dari proses identifikasi.
- 2) Kegiatan pendokumentasian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis untuk mendokumentasikan transaksi-transaksi sebelumnya.
- 3) “Aktivitas komunikasi” mengacu pada proses penyampaian laporan keuangan kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal organisasi, yang memerlukan informasi mengenai akuntansi perusahaan. Fungsi penting akuntan adalah memfasilitasi pengungkapan kesehatan keuangan perusahaan. Alasannya adalah laporan akuntansi memberikan wawasan berharga mengenai kualitas organisasi dan perubahan apa pun yang terjadi di dalam perusahaan. Laporan informasi kuantitatif dengan menggunakan satuan pengukuran berbasis uang disediakan oleh akuntansi. Pemangku kepentingan eksternal, termasuk anggota organisasi, secara aktif membuat laporan tata kelola keuangan untuk mempengaruhi penugasan yang akan datang.

## b. Akuntabilitas

Mereka yang bertugas merencanakan acara publik mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan alasan mereka di balik setiap pilihan dan tindakan yang mereka ambil. Sebagai bagian dari tanggung jawab, penyedia layanan harus mengakui kesalahan atau kesalahan langkah apa pun dalam pekerjaan mereka. Meskipun demikian, akuntabilitas publik dicirikan sebagai “kewajiban membagi tanggung jawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menuntut akuntabilitas dan kewajiban informasi.” Tugas dicirikan sebagai "tanggung jawab atas pengendalian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas entitas pelapor yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang ditentukan secara berkala" sesuai studi penelitian (Damin and Mustaqim 2021).

Akuntabilitas adalah proses dimana entitas, termasuk organisasi, kelompok, dan individu, menerima tanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil untuk memenuhi kewajiban masyarakat. Kesimpulan ini dapat dibuat berdasarkan sudut pandang beberapa ahli di bidangnya. Oleh karena itu, tuntutan tanggung jawab harus didukung dengan pemberian wewenang yang bersifat diskresi dan otoritatif.

Akuntabilitas publik berkaitan dengan kewajiban pihak yang berwenang untuk mengungkapkan, memperlihatkan, mengkomunikasikan, dan melaporkan seluruh kegiatan dan usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dipatuhi oleh pihak yang mempunyai kepercayaan, apabila pihak yang berwenang dan berhak menuntut pertanggungjawaban memintanya. Akuntabilitas publik terdiri dari dua elemen tersendiri:

- 1) Akuntabilitas horizontal mengacu pada tanggung jawab yang menjangkau bagian masyarakat yang lebih luas.
- 2) Ketika para petinggi dimintai pertanggungjawaban finansial, itu karena tugas mereka dalam akuntansi keuangan perusahaan. Allah SWT adalah sasaran akhir dari akuntabilitas agama (Damin and Mustaqim 2021)

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk membangun kepercayaan

masyarakat terhadap kompetensi suatu organisasi dalam menangani keuangannya secara bijaksana. Lebih banyak individu mungkin terinspirasi untuk mengambil peran manajerial karena besarnya kepercayaan publik yang dikembangkan. Lebih jauh lagi, tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terbentuknya tanggung jawab atas kinerja suatu organisasi, yang merupakan persyaratan mendasar untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang sehat dan unggul. Prasyarat untuk membangun akuntabilitas adalah terpenuhinya kondisi ini (Maulida 2021).

## 2. Prinsip Akuntansi Dalam Perspektif Islam

Ada prinsip-prinsip yang mendasari semua laporan keuangan dan temuan akuntansi lainnya. Prinsip-prinsip ini, yang berasal dari postulat akuntansi, tujuan laporan keuangan, dan kerangka teori akuntansi, berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan prosedur atau proses akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Mengenai unsur-unsur yang harus menjadi landasan akuntansi, banyak pihak yang berkepentingan mempunyai pendapat yang berbeda (Sitorus and Siregar 2022).

Mereka yang berurusan dengan uang atau membuat laporan keuangan harus mematuhi aturan akuntansi Islam yang ditetapkan dalam Alquran. Konsep tanggung jawab ditekankan oleh persyaratan ini. Salah satu aspek akuntansi yang paling mendasar adalah membuat laporan yang dapat digunakan dari data yang dikumpulkan dari transaksi keuangan. Proses akuntansi mencakup tindakan seperti pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan, dan analisis data keuangan perusahaan. Untuk memastikan teknik pencatatan internal mengikuti urutan yang benar, berikut transkripsi literal ayat-ayat Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
بِحُزْرَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ  
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai agar waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. serta hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. serta janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, lalu hendaklah ia menulis, serta hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), serta hendaklah ia bertaqwa bagi ALLAH tuhaninya, serta janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya ataupun lemah (keadaannya) ataupun dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, lalu hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. serta persaksikanlah dengan dua saksi orang-orang lelaki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, lalu (boleh) seorang laki-laki serta dua orang perempuan dari saksi yang kamuridhai, supaya jika seorang lupa lalu yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, serta janganlah kamu jemu menulis hutang ini, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi ALLAH serta lebih menguatkan persaksian serta lebih dekat bagi tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mua'malah itu), kecuali jika mua'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu menuliskannya. serta persaksikanlah apabila kamu perjual beli serta janganlah penulis serta saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melaksanakan (yang demikian), lalu sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Serta bertaqwalah bagi ALLAH, Allah mengajarmu serta ALLAH Maha Mengetahui segenap sesuatu.”

Tanggung jawab yang besar diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ditangani dengan baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan mereka, karena ayat ini memperjelas bahwa tujuannya adalah untuk menjaga kejujuran dan keadilan. Untuk memastikan bahwa semua individu terus memperoleh manfaat dari masyarakat yang semakin adil dan jujur, Al-Qur'an berfungsi sebagai perjanjian sosial. Inilah sebabnya mengapa akuntansi lebih mementingkan akuntabilitas dan bukan pada pengambilan keputusan. Menggunakan alat ukur yang tepat dan menghindari terlalu banyak atau terlalu sedikit juga ditekankan dalam Al-Qur'an. Bahkan ketika kita menyerahkannya kepada orang lain, kita tetap tidak boleh meminta ganti rugi karena status kita yang lebih tinggi (Ansari 2021).

Akuntansi dalam hukum Islam disebut muamalah. tapi sekarang terserah pada orang lain untuk memikirkan cara agar hal itu berhasil. Namun hal ini masih didasarkan pada hukum syariah; Fondasi akuntansi syariah yang meliputi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah 282. Berikut tiga unsur landasan ayat 282 Surat Al-Baqarah:

a. **Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability*)**

Ada beberapa aliran pemikiran dalam komunitas Muslim yang menganut prinsip dasar ini. Akuntabilitas dan konsep kepercayaan berjalan seiring. Persoalan keimanan, menurut umat Islam, muncul dari hubungan manusia dengan Penciptanya sejak ia dilahirkan. Beban menunaikan tugas khilafah di muka bumi telah dilimpahkan kepada umat manusia oleh Allah SWT. Salah satu fungsi terpenting kekhalifahan adalah menjalankan pemerintahan. Manusia dipercayakan tugas menjaga wilayah Tuhan di muka bumi, sebagaimana dituangkan dalam banyak bagian Al-Qur'an. Ini menyiratkan bahwa dalam akuntansi dan bisnis, setiap orang yang berpartisipasi dalam suatu transaksi bertanggung jawab penuh atas tindakan dan penilaian mereka sendiri. Hal ini karena mitra dan afiliasi pasti mempunyai pertanyaan karena sifat operasi perusahaan.

b. **Prinsip Keadilan**

Penafsiran risalah Al-Baqarah memuat nilai keadilan yang penting

bagi etika kehidupan sosial dan ekonomi serta sifat manusia secara keseluruhan. Penafsiran ini didukung oleh fakta bahwa terdapat angka 282 dalam teks ini. Hal ini menunjukkan bahwa individu dapat dan akan bertindak secara etis, apa pun yang terjadi. Memverifikasi dan mencatat makna istilah “adil” sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan kewajiban pelaku usaha dalam konteks akuntansi. Misalnya, jika transaksi senilai Rp 265 juta harus didokumentasikan, maka perusahaan (akuntan) juga wajib mencatat Rp 265 juta. Salah satu kemungkinan yang dapat disimpulkan dari hal ini adalah bahwa pembukuan perusahaan bebas dari "window dressing" karena semua transaksi didokumentasikan.

c. **Prinsip Kebenaran**

Sebenarnya, konsep keadilan tidak dapat dianggap terpisah dari konsepsi ini. Masalah dalam mengidentifikasi dan mengukur laporan, misalnya, masih terjadi pada profesi akuntansi. Jika landasan ikhtiar ini adalah kebenaran, maka niscaya akan berhasil. Fakta ini berpotensi mendorong pengembangan nilai wajar dalam proses pengakuan, kuantifikasi, dan pelaporan transaksi keuangan. Oleh karena itu, metode akuntansi harus diubah agar lebih mematuhi hukum syariah dan mewujudkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kebenaran (Harmain et al. 2019).

### **3. Akuntansi Masjid**

"Sajada" adalah istilah Arab yang berarti "tempat beribadah kepada Allah SWT dengan cara sujud" atau "tempat melaksanakan ritual keagamaan", keduanya mempunyai arti yang mungkin dimiliki oleh kata "masjid". Dalam keadaan lain, umat Islam menyebut Bumi sebagai masjid. Kecuali kuburan, tempat bersuci, dan tempat yang secara tegas dilarang oleh hukum Islam, umat Islam bebas melaksanakan salat di mana pun mereka mau. Masjid berfungsi sebagai ruang komunal bagi pemeluk agama Islam, selain berperan sebagai ibadah (Hatta 2021).

Ajaran Islam tidak dapat dibandingkan dengan standar materialistis yang dianjurkan oleh kantor pelaporan akuntansi lain karena masjid adalah lembaga

publik yang melayani masyarakat dengan mengajarkan prinsip-prinsip spiritual Islam. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lembaga-lembaga keagamaan, khususnya masjid dan Islam, sebagian besar telah diabaikan dalam penelitian akademis dan akuntansi arus utama. Memang benar, reformasi administratif seperti penerbitan dan akuntabilitas keuangan diperlukan agar manajemen organisasi publik, termasuk masjid, dapat mematuhi cita-cita dasar keterbukaan (transparansi) dan tanggung jawab komunitas. menulis. Hal ini disebabkan karena masjid berfungsi sebagai tempat berkumpulnya umat Islam untuk beribadah dan berbagi perayaan budaya dan agama (Islamiyah 2019).

Akuntansi disebut sebagai muamalah dalam teori Islam. Oleh karena itu, kecerdasan manusia pada akhirnya bertanggung jawab atas produksinya. Karakteristik yang berbeda-beda ini memberikan bukti kuat bahwa akuntansi lebih dari sekadar alat sekuler untuk mengelola perusahaan. Merupakan alat pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan Tuhan, di luar lingkup dunia sekuler atau akuntansi syariah yang melibatkan pemilik perusahaan. Nilai metafisik akuntan dapat ditunjukkan (Sitorus and Siregar 2022).

Pembukuan adalah salah satu bentuk akuntansi masjid yang terdiri dari serangkaian kegiatan sektor keuangan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi masjid. Terdapat hubungan erat antara praktik akuntansi organisasi keagamaan dan sektor publik. Orang-orang yang dianggap sebagai ranah publik dalam perdebatan ini adalah anggota organisasi keagamaan yang bersangkutan, baik perorangan maupun penganutnya. Dalam situasi seperti ini, organisasi masjid mencakup komunitas lokal dan umat Islam di seluruh dunia.

#### **4. Manajemen Organisasi Peribadatan**

Biasanya, orang beragama yang dihormati diberi kendali dan pengawasan terhadap rumah ibadah. Di sebagian besar organisasi, kebijakan dan administrasi diawasi oleh individu atau kelompok yang berkuasa. Gaya kepemimpinan, termasuk penyusunan struktur organisasi, pemimpin atau tokoh

sangat dipengaruhi oleh tipologinya, termasuk pengambilan keputusan dan orientasi kebijakannya. Organisasi di dalam masjid juga mengalami kesulitan ini. Orang ini sering mengemban banyak tugas, termasuk menjadi imam, khatib, panitia zakat, dan pengurus jenazah, serta sering menjadi ustadz di masjid-masjid di daerah pedesaan.

Di sebagian besar tempat ibadah, struktur organisasinya lebih santai dan tidak rumit. Takmir, atau panitia pelaksana masjid, terdiri dari anggota-anggota berikut: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi, dan asisten umum. Tidak jarang kemampuan sosial, keagamaan, dan organisasi seorang tokoh agama menentukan sejauh mana kemajuan sebuah masjid. Tingkat pemahaman yang lebih tinggi antara manajemen dan sosial-agama menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya organisasi masjid dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi kontemporer, sehingga masjid dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Namun, pengetahuan dan keterampilan organisasi pengurus masjid masih kurang, dan hal ini tidak memperhitungkan kurangnya pemahaman mereka terhadap akuntansi dalam organisasi masjid.

## **5. Pengelolaan Keuangan Masjid**

Akan selalu ada masjid di setiap kota dimana terdapat populasi Muslim yang cukup besar. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pelaporan dan pendidikan komunitas selain sebagai tempat sholat bagi umat Islam yang mencari hubungan spiritual dengan Allah. Selama masa hidup Nabi, masjid berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, termasuk dzikir, pendidikan, dan nasihat. selain imbalan sosial), militer (termasuk pelatihan dan persiapan peralatan), perawatan korban perang, mediasi perselisihan, keramahtamahan, pemenjaraan tawanan perang, dan perlindungan agama (Putra And Rumondor 2019).

Berikut komponen mekanisme persiapannya: (1) Setiap bagian memerinci rencana tindakan yang dihasilkan dari pertemuan jemaat tahunan mengenai kegiatan-kegiatan, termasuk cara mencari acara, kapan mengadakannya, berapa banyak uang yang dibutuhkan, dan bagaimana

menjadwalkannya; (2) Memberikan anggaran khusus sektor kepada Rapat Kerja Pengurus; (3) Dengan memperhitungkan biaya setiap item, berbagai sumber keuangan dan pendapatan diintegrasikan; (4) Menjaga disiplin keuangan. Selama rapat staf, manajemen menetapkan sasaran pengeluaran dan pendapatan untuk acara mendatang. Untuk menghindari defisit, manajemen bekerja keras untuk menjamin bahwa anggaran mempunyai metode pembiayaan yang jelas. Sektor-sektor mendapatkan bagiannya dalam anggaran, dan prioritas ditetapkan berdasarkan dana yang tersedia untuk setiap kegiatan. Pengeluaran dan penerimaan direncanakan secara cermat dalam Rencana Pengelolaan Kerja dan Anggaran (RKAP), yang mengintegrasikan seluruh bidang keilmuan terkait ke dalam proses penganggaran. Ketiga, Uang Masuk dan Keluar Setiap hari, sebaiknya catatlah transaksi uang tunai Anda pada sebuah buku yang bisa Anda jumlahkan di akhir bulan. Sebagian besar masjid memiliki bendahara yang bertugas mencatat uang.

Para penanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika organisasi keagamaan yang kita sebut masjid ingin menjaga kepercayaan masyarakat. Masjid, menurut konsekuensi teori penatalayanan, adalah institusi terpercaya yang bertindak demi kepentingan publik dan memenuhi tanggung jawabnya. Istilah "akuntabilitas" berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan untuk mengungkapkan cara di mana laporan keuangan eksternal dievaluasi oleh pemangku kepentingan yang bergantung pada mereka untuk merumuskan keputusan mengenai pengeluaran organisasi (Susanto, Basalamah, and Rahim 2019). Dengan menggunakan model ini sebagai panduan, kita dapat menentukan dua fungsi utama pengelolaan keuangan:

- a. Fungsi mendapatkan dana.
- b. Fungsi memakai dana.

Tanggung jawab pengawasan keuangan organisasi keagamaan dipercayakan kepada sekelompok individu yang mempunyai kewenangan yang diperlukan sebagai bagian dari kerangka akuntabilitas. Selain itu, menjaga karakteristik ini penting untuk membangun kepercayaan terhadap pengelolaan yang sedang dijalankan; oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan hal ini. Kegagalan untuk memenuhi aspek akuntabilitas ini dapat mengakibatkan

berkembangnya ketidakpercayaan atau bahkan fitnah (Aulia 2022).

Administrasi masjid, atau masjid Idahan, adalah kombinasi ilmu pengetahuan dan bisnis. Ini mencakup semua upaya yang dilakukan oleh umat Islam dengan tujuan membangun masjid untuk dijadikan rumah sholat dan warisan Islam. Beragam upaya positif dimanfaatkan oleh para pengurus, pimpinan, dan jamaah masjid untuk mencapai tujuan masjid sesuai dengan fungsinya sebagai proses atau ikhtiar mencapai kesejahteraan masjid yang ideal, atau idah masjid. Keuntungan berikut dapat Anda ambil jika Anda menerapkan pendekatan manajemen yang benar:

- 1) Akan ada artikulasi yang masuk akal dan sesuai mengenai hasil yang diinginkan.
- 2) Tugas-tugas penting untuk mencapai tujuan kemakmuran masjid dicapai melalui kerja tim, dengan kerja sama yang erat dan koordinasi yang cermat; hal ini membuat upaya ini tampak tidak terlalu menakutkan.
- 3) Dengan melakukan hal ini, kami memastikan bahwa tidak ada administrator yang perlu mengulangi upaya yang dilakukan administrator lain.
- 4) Standar dan tolok ukur yang terbuka dan mudah dilihat membuat evaluasi dan implementasi menjadi lebih sederhana (Nuramalina 2021).

## 6. Standar ISAK 35

Setelah diadopsi secara resmi pada 11 April 2019, standar akuntansi keuangan baru ISAK 35 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Pantas jika standar ini disebut sebagai standar akuntansi “baru”. Untuk menyetujui ISAK 35 dan menghapus PSAK 45, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan PSAK 13, yang mengatur pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba (Diviana et al. 2020).

Laporan keuangan yang membentuk PSAK 45 meliputi penelaahan atas laporan keuangan, serta laporan hasil operasional, arus kas, perubahan aset bersih, dan arus kas, serta laporan perubahan aset bersih dan arus kas. Ini menyangkut administrasi kekayaan bersih. Penting untuk dicatat bahwa aset

bersih terbatas, baik sementara atau permanen, didefinisikan berbeda berdasarkan PSAK 45 dibandingkan aset bersih tidak dibatasi. Terdapat batasan jangka panjang dan jangka pendek pada aset bersih yang dibatasi penggunaannya. Meskipun ISAK 35 memuat laporan laba rugi yang lengkap, namun klasifikasi aset bersih yang digunakan di dalamnya dibagi menjadi aset bersih yang dibatasi dan tidak dibatasi. Pembatasan lainnya tercakup dalam ISAK 35 (Awalia, Siregar, and Syarvina 2023).

Bagi organisasi nirlaba, PSAK 1 Penyajian laporan keuangan mengatur standar minimum isi laporan keuangan, bentuk laporan keuangan, dan penyajiannya. Perusahaan harus terlebih dahulu menyampaikan laporan keuangan yang telah dihasilkan sesuai dengan persyaratan. Berdasarkan ISAK 35, prosedur akuntansi amal dapat menyediakan jenis laporan keuangan sebagai berikut:

a. **Laporan Posisi Keuangan**

Laporan aset adalah dokumen yang menyajikan kepada pembaca tentang aset, kewajiban, dan kekayaan bersih suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk tujuan membuat pilihan yang sesuai, pengguna laporan keuangan dapat menggunakan laporan ini untuk menilai aset dan kewajiban organisasi nirlaba. Contoh laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Contoh Laporan Posisi Keuangan**

<b>ENTITAS XXX</b>		
<b>LAPORAN Posisi Keuangan per 31 Desember 20x2</b>		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas serta setara kas	XXX	XXX
Piutang bunga	XXX	XXX

Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
Aset lancar lain	XXX	XXX
<b>Total Aset Lancar</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Properti Investasi	XXX	XXX
Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
Aset Tetap	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>TOTAL ASET</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Pendapatan diterima dimuka	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Liabilitas imbalan kerja	XXX	XXX
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	XXX	XXX
<b>Total Liabilitas</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>ASET NETO</b>		
<b>Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya</b>		
Surplus Akumulasi	XXX	XXX
Penghasilan Komprehensif lain	XXX	XXX
<b>Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya</b>	XXX	XXX
<b>Total Aset Neto</b>	XXX	XXX
<b>TOTAL LIABILITAS serta ASETNETO</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>

Sumber: ("ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba," n.d.)

b. **Laporan Penghasilan Komprehensif**

Bersamaan dengan laporan kelengkapan lainnya, laporan ini menunjukkan surplus (defisit) entitas. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan selama periode waktu tertentu selain laba atau rugi entitas tersebut pada waktu yang sama. Contoh keseluruhannya adalah laporan pendapatan yang terlihat di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif**

<b>ENTITAS XXX</b>		
<b>Laporan Penghasilan Komprehensif agar tahun yang berakhir</b>		
<b>pada tanggal 31</b>		
<b>Desember 20X2</b>		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
<b>TANPA PEMBATAAN DARI</b>		
<b>PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Sumbangan	XXX	XXX
Jasa Layanan	XXX	XXX
Penghasilan Investasi jangka pendek	XXX	XXX
Penghasilan Investasi jangka panjang	XXX	XXX
Lain-lain	XXX	XXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Beban</b>		
Gaji, Upah	XXX	XXX
Jasa serta Profesional	XXX	XXX
Administrasi	XXX	XXX
Deprestasi	XXX	XXX
Bunga	XXX	XXX
Lain-lain	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>Total Beban</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Kerugian akibat kebakaran	XXX	XXX
<b>Total Beban</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>DENGAN PEMBATAS DARI PEMBERI SUMBERDAYA</b>		
<b>Pendapatan</b>		
Sumbangan	XXX	XXX
Penghasilan Investasi jangka panjang	XXX	XXX
<b>Total Pendapatan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Beban</b>		
Kerugian akibat kebakaran	XXX	XXX
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIFLAIN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

Sumber: ("ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba," n.d.)

c. **Laporan Perubahan Aset Neto**

Tulisan ini memberikan informasi mengenai kekayaan bersih yang tidak tunduk pada batasan apa pun dari penyedia sumber daya (donor) dan kekayaan bersih yang tunduk pada batasan tertentu dari penyedia sumber daya. Bersama dengan pembatasan yang relevan, laporan pelepasan aset yang diberikan oleh pemasok sumber daya juga disertakan dalam laporan perubahan aset bersih. Contoh laporannya adalah laporan perubahan aktiva bersih sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Contoh Laporan Perubahan Aset Neto**

<b>ENTITAS XXX</b>		
<b>Laporan Perubahan Aset Neto agar tahun yang berakhir pada</b>		
<b>tanggal 31</b>		
<b>Desember 20X2</b>		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN</b>		
<b>DARIPEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo awal	XXX	XXX
<b>Surplus tahun berjalan</b>	XXX	XXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>		
Saldo awal	XXX	XXX
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>Total</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>ASET NETO DENGAN</b>		
<b>PEMBATASANDARIPEMBERI</b>		
<b>SUMBER DAYA</b>		
Saldo awal	XXX	XXX
Surplus tahun berjalan	XXX	XXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Saldo akhir	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>

*Sumber:* ("ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non  
Laba," n.d.)

**d. Laporan Arus Kas**

Dalam hal ini, laporan arus kas memberikan informasi tentang

pendapatan dan pengeluaran yang dialami bisnis selama periode waktu tertentu. Laporan Arus Kas yang diwajibkan mencakup laporan khusus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mengenai aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.

**Tabel 2.4**  
**Contoh Laporan Arus Kas**

<b>ENTITAS XXX</b>		
<b>Laporan Arus Kas</b>		
<b>Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2</b>		
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>		
	20X2	20X1
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Kas dari sumbangan	XXX	XXX
Kas dari pendapatan jasa	XXX	XXX
Bunga yang diterima	XXX	XXX
Penerimaan lain-lain	XXX	XXX
Bunga yang dibayarkan	XXX	XXX
Kas yang dibayarkan bagi karyawan	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<i>kas neto tugas operasi</i>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXX	XXX
Pembelian peralatan	(XXX)	(XXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXX	XXX
Pembelian investasi	<u>(XXX)</u>	<u>(XXX)</u>
<i>Kas neto yang dipakai agar aktivitas investasi</i>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi</i>	XXX	XXX

<i>untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi ( <i>endowment</i> )	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
Investasi bangunan	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi agar reinvestasi	XXX	XXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
<i>Kas neto yang dipakai agar tugas pendanaan</i>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>

*Sumber:* ("ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba," n.d.)

e. **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Bagian laporan keuangan ini memberikan laporan tambahan pada laporan utama untuk membantu pembaca lebih memahami informasi yang dikandungnya. Bagian dari laporan keuangan ini juga dikenal sebagai tinjauan kaki. Tidak ada cara untuk memisahkan bagian ini dari laporan keuangan yang diungkapkan sebelumnya.

## 7. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Kumpulan orang-orang yang berkumpul, secara formal atau informal, untuk mencapai tujuan bersama disebut organisasi. Demikian pula, setiap kelompok atau organisasi yang secara hukum diakui sebagai suatu pribadi atau yang keberadaannya dijamin oleh undang-undang, disebut sebagai "badan" dalam pengertian hukum (Aisyah, 2019).

Suatu organisasi atau usaha yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan disebut sebagai "nirlaba". Sebuah organisasi yang bekerja terutama

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai subjek tertentu dan bukan untuk keuntungan finansial disebut sebagai "nirlaba". Yang termasuk dalam kelompok organisasi "nirlaba" antara lain tempat ibadah, sekolah umum, badan amal politik, fasilitas kesehatan masyarakat, partai politik, kelompok advokasi peraturan perundang-undangan, museum, organisasi profesi, lembaga penelitian, bahkan pegawai pemerintah tertentu (Mutammimah, Yulinartati, and Nastiti 2019).

Organisasi nirlaba dan perusahaan nirlaba memiliki metode bisnis yang agak berbeda. Organisasi nirlaba lebih didorong oleh kepentingan publik dibandingkan uang. Meskipun menghasilkan keuntungan bukanlah tujuan organisasi nirlaba, kekurangan finansial dapat berdampak buruk pada kapasitas organisasi untuk mencapai tujuannya. Sisa uang akan dibagi untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Laporan keuangan ditulis dalam rangka memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai keadaan keuangan perusahaan pelapor dan segala transaksi yang dilakukan selama periode pelaporan. Fondasi rekening keuangan masjid, menurut Ayub, juga menjadi sumber pendapatan dan belanja. Catatan keuangan masjid menjelaskan secara rinci sumber dan penggunaan dananya. Seminggu sekali atau sebulan sekali, selisih antara dua jalur dihitung dengan menjumlahkan dan membandingkan jumlah total dari kedua jalur tersebut. Keuntungannya biasanya melebihi kerugiannya. Namun kenyataannya, cadangan keuangan masjid terus bertambah dan banyak hadiah yang tidak dimanfaatkan. Sebenarnya, ia memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika digunakan. Akuntansi adalah alat untuk membuat laporan yang relevan dan akurat yang dapat digunakan secara efektif dan menguntungkan (Juniaswati and Murdiansyah 2022).

## **8. Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba**

Masjid adalah contoh organisasi nirlaba sektor keagamaan. Selain itu, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 Tahun 2011, organisasi nirlaba diwajibkan untuk membuat dan mendistribusikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Sesuai dengan statusnya

sebagai pemangku kepentingan, masjid wajib menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasi terkait kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan akuntansi yaitu untuk menunjang pengelolaan keuangan sebagai instrumen perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan, adalah untuk menjamin terciptanya laporan keuangan yang akurat mengenai dana masjid.

Pos-pos anggaran dan penghasil pendapatan biasanya dikonsolidasikan ke dalam satu entri pada laporan keuangan masjid atau musala; nilai dan kuantitas aset biasanya diabaikan. Oleh karena itu, kelemahan dalam sistem pencatatan laporan keuangan telah menyebabkan beberapa aset masjid hilang. Masjid merupakan salah satu komponen organisasi publik yang tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Karena setiap aset yang dikendalikan oleh suatu organisasi perlu dibuktikan, transparansi dan akuntabilitas adalah model pengelolaan keuangan di abad kedua puluh satu (Karimah and Baehaqi 2022).

Sistem yang terorganisir dengan baik untuk melacak dan melaporkan keuangan masjid sangat penting bagi kelangsungan dan keberhasilan lembaga keagamaan seperti masjid. Khususnya penerapan teori dan praktik akuntansi untuk pengembangan sistem pelaporan keuangan yang andal. Menjadi akuntabel berarti menerima tanggung jawab, dan sehubungan dengan pengelolaan dana masjid yang tepat, penting untuk menunjukkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pengurus masjid dan jamaah.

Saat ini, lebih dari sebelumnya, terdapat kebutuhan mendesak akan pelaporan keuangan yang jujur dan terbuka. Hal ini terutama berlaku jika dana tersebut berasal dari organisasi nirlaba yang disponsori secara keagamaan. Mengapa? Sebab masjid dinilai sebagai institusi terbaik di masyarakat.

Masjid sebagai badan hukum mempunyai kewajiban menerima sumbangan berupa sedekah, bingkisan, dan berbagai bentuk bantuan sosial dari anggota masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua pelaporan keuangan harus diawasi oleh publik. Agar sebuah organisasi berhasil dan bertahan di masyarakat, harus ada penekanan pada pelaporan yang bertanggung

jawab dan terbuka.

## B. Penelitian Terdahulu

Sumber-sumber dari publikasi sebelumnya yang tercantum di bawah ini sangat penting untuk proses penulisan skripsi:

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Ibrahim Susanto, Salim Basalamah, serta Syamsuri Rahim (2019)	Akuntabilitas Masjid: Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Makassar.	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus Masjid Raya Makassar dan Masjid Al Markaz Al Islami juga menerapkan model pencatatan sederhana sebagai sistem pengendaliannya. Untuk mendapatkan saldo total, pendekatan ini mencatat penarikan tunai dan arus masuk keuangan terlebih dahulu, kemudian menambahkan kedua jumlah tersebut. Meskipun perekamannya juga sangat sederhana, kami tidak mengalami masalah saat menggunakannya di kehidupan nyata. Pengelola Masjid Raya Makassar dan Masjid Al Markaz Al Islami menetapkan sejumlah rencana tersendiri untuk mengalokasikan

No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				tanggung jawab pengelolaan dana masjid. Pengelola Masjid Al Markaz Al Islami dan Masjid Agung Makassar secara rutin membuat inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pengembangan komunitas dan masjid.
2.	Nurfitriyani (2019)	Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Al-Markaz Al-Islami Jend. M. Jusuf Dalam Perspektif Islam	Metode kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan masjid belum memenuhi persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tahun 2007. Di sisi lain, transparansi masjid sejalan dengan ajaran QS. Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang menyatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dan harus dihadirkan saksi-saksinya.
3	Anisa Riski Aulia (2022)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Laporan	Metode kualitatif	Temuan menunjukkan bahwa Masjid Nurul Yaqin dan Masjid Baitul Muhtadin di Kecamatan Bumi Raya mematuhi indikator akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya.

No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Keuangan Masjid Dengan Pendekatan Fenomenologi (Studi Pada Masjid Di Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras)		Fakta bahwa dua masjid yaitu Masjid Nurul Yaqin dan Masjid Majid Baitul Muhtadin memiliki laporan keuangan yang berfungsi untuk mengelola laporan tersebut menjadi bukti akan hal tersebut. Anda mungkin melihat informasi rinci tentang semua uang masuk dan keluar. Mudah atau tidaknya akses jamaah terhadap informasi keuangan masjid menjadi tolak ukur seberapa transparan masjid mengelola pelaporan keuangannya.
4	Riza Ramadhan (2022)	Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Di Lembaga Masjid	Metode kualitatif	Berdasarkan keyakinan masyarakat yang mempercayakan agamanya kepada pengurus masjid, penelitian menunjukkan bahwa metode pengendalian keuangan pada organisasi masjid juga tetap dipertahankan. Sumbangan dari anggota masyarakat menyediakan dana yang akan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menjamin kesejahteraan masyarakat dan

No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				<p>usaha-usaha sejenisnya. Sikap positif memang mengagumkan, namun akan jauh lebih baik jika keyakinan positif didukung oleh bukti, seperti metode akuntansi yang digunakan oleh kelompok Muslim untuk menjaga keuangan mereka tetap terkendali. Karena bukti kuat ini, masyarakat akan lebih percaya pada masjid sebagai sebuah institusi dan bersedia menyumbang secara finansial kepada masjid tersebut.</p>
5	Nurritzka Noviana (2021)	<p>Analisis Akuntabilitas serta Transparansi Dalam pengendalian Keuangan Masjid Di Kota Palembang (Studi Kasus 3 Masjid Besar)</p>	Metode pendekatan kualitatif deskriptif	<p>Hasilnya, tidak satu pun dari tiga masjid yang menjadi bagian dari penelitian ini yang mempraktikkan akuntabilitas dan keterbukaan. Hal ini disebabkan karena ketiga masjid yang diaudit tidak ada laporan keuangannya yang dibuat sesuai dengan PSAK No. 45 atau ISAK 35, dan semuanya hanya mencatat uang yang masuk dan keluar.</p>
6	Reni Andriyani (2021)	<p>Pengelolaan Keuangan Masjid Al-</p>	Metode kualitatif	<p>Salah satu strategi yang paling mujarab dalam menggalang donasi untuk Masjid Al-</p>

No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Mukhlisin Desa Cinta Makmur Kecamatan Panah Hulu Kabupaten Labuhan Batu		Mukhlisin yang terletak di Desa Cinta Makmur, menurut hasil penelitian ini, adalah dengan mendirikan kotak amal yang selanjutnya dikelola oleh pemuda masjid dan badut, selain menerima kontribusi dari masing-masing dusun di desa tersebut. Penting untuk memantau secara ketat pengeluaran dana yang telah dialokasikan sesuai dengan anggaran daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dana yang dianggarkan dapat didokumentasikan dan dimanfaatkan secara efektif dan tepat. Selain itu, sumbangan bulanan sebesar Rp 300.000 diberikan kepada anak yatim, dan pemberitahuan diberikan kepada wali masing-masing anak mengenai alokasi tersebut.
7	Ardita Noviana (2019)	Akuntabilitas serta Transparansi Dalam pengendalian	Metode kualitatif	Salah satu aspek akuntabilitas keuangan masjid adalah keterbukaan atau transparansi yang mana penelitian menunjukkan bahwa staf

No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Keuangan Masjid Melalui Pendakatan Fenomenologi Pada Masjid Al-Muqorrobin di desa Pinggirpapas		administrasi pernah menangani masalah keuangan. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan meminta pertanggungjawaban orang merupakan pendekatan progresif dalam pengelolaan keuangan.
8	Karyn Tri Juniaswati serta Isnan Murdiansyah (2022)	Akuntabilitas pengendalian Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang berlandaskan ISAK 35.	Metode kualitatif	Masjid Sabilillah Kota Malang telah menerapkan indikator akuntabilitas dalam menyikapi penelitian ini, namun pihak masjid belum mempertanggungjawabkan tindakannya. Kurangnya integrasi antara pelaporan keuangan masjid dan ISAK 35 menjadi penyebab hal tersebut. Sementara itu, penerapan transparansi secara menyeluruh belum terjadi karena belum terpenuhinya ketentuan UU No. 28 Tahun 2004.
9	Sukma Diviana (2020)	Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba	Metode kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, dokumen-dokumen berikut disusun: Laporan Laba Rugi Komprehensif yang merinci kenaikan dan penurunan kekayaan bersih; Laporan

No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		berlandaskan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi		Posisi Keuangan yang merinci nilai harta, kewajiban, dan kekayaan bersih Masjid Baitul Haadi per tanggal 31 Januari dan 29 Februari, Laporan Arus Kas yang merinci penggunaan kas dari tugas operasional, pendanaan, dan investasi; dan terakhir review Laporan Keuangan Masjid Baitul Haadi secara umum.
10	Windy Azhari (2021)	Analisis Penerapan akuntansi keuanan pada masjid paripurna kecamatan pekanbaru kota	Metode kualitatif	Investigasi ini menemukan bahwa tidak ada satupun pengurus masjid paripurna di kecamatan Kota Pekanbaru yang mengikuti prinsip akuntansi yang diakui secara luas saat menyiapkan laporan keuangannya. Metode akuntabilitas masing-masing masjid masih mengandalkan metode pencatatan biasa yang sudah teruji dan benar, yaitu pengumuman mingguan mengenai pendapatan dan pengeluaran. Karena merupakan masjid paripurna, artinya berada di bawah kendali pemerintah, maka pemerintah harus memastikan

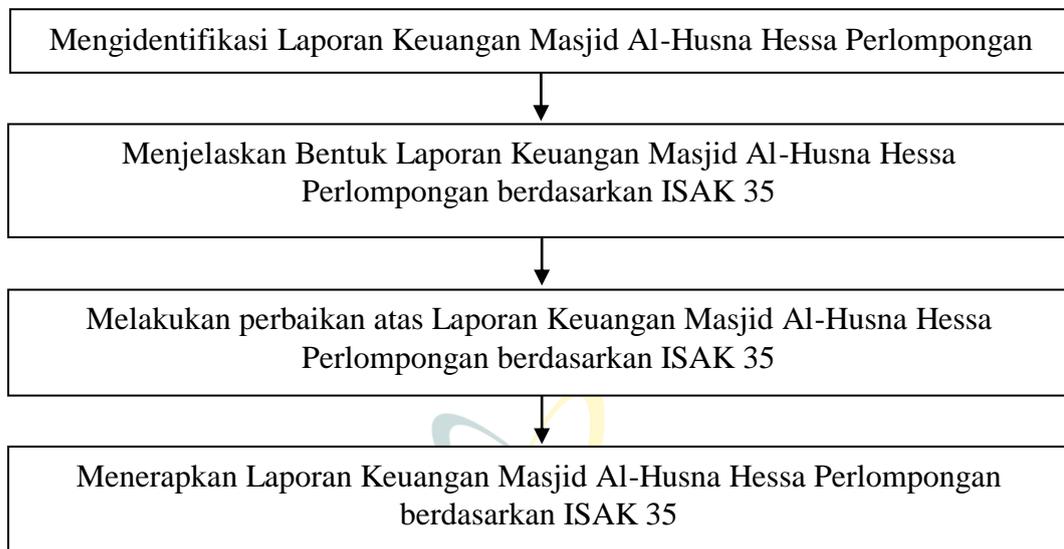
No`	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				bahwa seluruh pengurus masjid mendapat arahan tentang cara mencatat kegiatan masjid dengan baik dan dengan cara pembukuan yang benar.

*Sumber: informasi diolah (2023)*

### C. Kerangka Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tugas administrasi Masjid Al-Husna yang berkaitan dengan pengawasan evaluasi keuangannya. Survei awal terhadap calon pengguna data harus dilakukan sebagai langkah awal dalam proyek studi ini. Dalam survei ini, kami membahas topik-topik seperti mempelajari seluk beluk proses pengendalian keuangan masjid dan merasakan cara mengelola dana masjid.

Setelah ini, peneliti akan menanggapi pertanyaan tentang nilai-nilai yang mendasari fenomena yang mendasari metode pengendalian keuangan. Teori yang disebutkan sebelumnya menguraikan metode fenomenologis yang digunakan untuk mengkarakterisasi kejadian tersebut. Setelah kita mencapai tahap ini, kita dapat menghubungkan hasil pertanyaan tersebut dengan ISAK 35. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan beberapa informasi dan jawaban yang telah dikumpulkan hingga saat ini. Peneliti membangun kerangka konseptual dengan cara sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Teoritis**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN